



Judul : Fraksi PPP dorong interpelasi hambalang
Tanggal : Sabtu, 17 Nopember 2012
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 2

LAW ENFORCEMENT

Fraksi PPP Dorong Interpelasi Hambalang

JAKARTA—Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) di DPR, Arwani Thomafi, mengatakan DPR berhak menggunakan hak interpelasi untuk memertanyakan kepada presiden soal kasus proyek pusat pelatihan pendidikan dan sarana olahraga nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Menurut Arwani, interpelasi merupakan hak yang melekat bagi DPR. "Hak bertanya itu ada melekat di DPR," kata Arwani, kepada wartawan, Jumat (16/11).

Seperti diketahui, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR menemukan sejumlah dugaan penyelewengan dari hasil telaah audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap proyek P3SON Hambalang. Atas temuan itu, BAKN merekomendasikan DPR menggunakan hak interpelasi.

Arwani mengatakan rekomendasi tersebut sudah menjadi keputusan BAKN. Menurut dia, keputusan BAKN DPR tersebut sudah sepenuhnya diketahui oleh semua fraksi di DPR, termasuk Fraksi PPP. "Semua fraksi juga ada di situ," kata Ketua DPP PPP itu.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Anis Matta juga menanggapi usul penggunaan hak interpelasi tersebut. Menurut dia, hak interpelasi itu akan ditentukan dalam rapat pimpinan DPR. "Rencana penggunaan hak interpelasi DPR kepada pemerintah terkait penyelewengan anggaran P3SON ditentukan melalui mekanisme Rapim Pimpinan DPR," kata Anis Matta, di Jakarta, Rabu (14/11) lalu.

Salah satu pertimbangan mendasar bagi Rapim DPR untuk menentukan sikapnya, menurut Anis Matta, adalah hasil analisis Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) dalam rekomendasi, yang berasal dari hasil audit BPK terhadap proyek Hambalang itu.

"Semua rekomendasi akan kami proses dan kita akan mengadakan rapat pimpinan sesuai mekanisme," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. **(boy-fas/jpnn)**